



KEPEMIMPINAN GEREJA DAN RADIKALISME: STUDI RESPONS PASTORAL TERHADAP INTOLERANSI KEAGAMAAN DI INDONESIA

(Church Leadership and Radicalism: A Study of Pastoral Responses to Religious Intolerance in Indonesia)

Yogi Mahendra

STT Bethel Indonesia Jakarta

Yogi.mahendra@sttbi.ac.id

Diterima: 12 Februari 2025; Direvisi: 12 April 2025; Diterbitkan 31 Mei 2025

Abstract

This study aims to identify an effective model of church leadership in responding to religious intolerance in Indonesia. Using a qualitative approach with a constructive design, the research captures the responses of church leaders in areas prone to religious conflict. The findings show that church leadership integrating public theology and transformative leadership can serve as a driving force for a culture of peace and religious literacy in a pluralistic society. However, significant challenges are faced by church leaders, including internal resistance from congregants, limited resources, and socio-political pressures. Proposed strategies include tolerance education, digital literacy, interfaith collaboration, and the application of Pancasila values. This research enriches the discourse on practical theology and provides practical guidelines for church leaders in addressing religious radicalism in the digital era. Thus, this study recommends strengthening the role of the church as a social transformation agent to achieve fair interfaith harmony.

Keywords: Church Leadership; Public Theology; Religious Tolerance; Religious Literacy; Radicalism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi model kepemimpinan gereja yang efektif dalam menanggapi intoleransi keagamaan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain konstruktif, penelitian ini memotret respons pemimpin gereja di daerah-daerah yang rawan konflik agama. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan gereja yang mengintegrasikan teologi publik dan kepemimpinan transformatif dapat menjadi motor penggerak budaya damai dan literasi keagamaan di tengah masyarakat pluralistik. Namun demikian, tantangan signifikan dihadapi pemimpin gereja berupa resistensi internal jemaat, keterbatasan sumber daya, dan tekanan sosial-politik. Strategi yang diusulkan mencakup edukasi toleransi, literasi digital, kolaborasi lintas agama, serta penerapan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini memperkaya diskursus teologi praktis dan memberikan panduan praktis bagi pemimpin gereja dalam menghadapi radikalisme agama di era digital. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran gereja sebagai agen transformasi sosial untuk mewujudkan kerukunan lintas agama yang berkeadilan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Gereja; Teologi Publik; Toleransi Beragama; Literasi Keagamaan; Radikalisme

PENDAHULUAN

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi peningkatan tajam dalam pelanggaran kebebasan beragama. Pada tahun 2023 saja, Setara Institute¹ mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)—sebuah lonjakan signifikan dibandingkan 2022—yang paling banyak dialami oleh umat Kristen dan Katolik sebanyak 54 kejadian.² Kasus-kasus tersebut mencakup gangguan izin pembangunan tempat ibadah, diskriminasi, hingga intimidasi verbal maupun fisik. Sebagai minoritas, komunitas Kristen kerap berada di ujung penyikaman ketika nilai-nilai pluralisme dan tata kelola toleransi mengalami tekanan, sehingga menciptakan kebutuhan mendesak untuk kehadiran sacerdotal yang mampu merespons kondisi sosial-keagamaan secara tepat.

Belum luput dalam ingatan kita tentang kekerasan terhadap tubuh simbol mereka semakin tajam tergambar pada peristiwa pengeboman Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021. Insiden ini terjadi saat misa Minggu Palma dan melukai sekitar 20 orang, meskipun pelaku bunuh diri tewas.³ Pelaku yang terkait dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok radikal berafiliasi ISIS, sengaja menargetkan simbol agama Kristen, bukan hanya untuk melukai, tetapi juga untuk meruntuhkan kepercayaan sosial dan menimbulkan rasa takut terhadap jemaat. Reaksi berbagai pihak termasuk PBNU, KWI, dan pemerintah daerah menunjukkan upaya bersama dalam menolak kekerasan ini, tetapi pertanyaan muncul tentang seberapa efektif respons tersebut menyentuh sisi pastoral yang langsung mempengaruhi jemaat.

Dalam realitas demikian, teologi pastoral tidak lagi cukup hanya berfokus pada pembinaan spiritual internal. Pemimpin gereja dituntut bersifat transformatif dan publik,

¹ Setara Institute adalah lembaga riset independen yang fokus pada isu-isu kebebasan beragama, toleransi, hak asasi manusia, dan demokrasi di Indonesia. Lembaga ini secara rutin menerbitkan laporan tahunan tentang kondisi kebebasan beragama dan intoleransi di Indonesia yang menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Didirikan oleh tokoh-tokoh aktivis HAM, Setara Institute aktif melakukan advokasi dan pendidikan publik untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia.

² CNN Indonesia, “Setara Institute Catat 329 Pelanggaran KBB Sepanjang 2023,” CNN Indonesia, 2024, https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/?utm_source.

³ Badan Pendidikan Kristen Penabur, “Peristiwa Bom di Gereja Katedral Makassar 2021,” Badan Pendidikan Kristen Penabur, 2024, <https://bpkpenabur.or.id/bekasi/smak-penabur-harapan-indah/berita/berita-lainnya/peristiwa-bom-di-gereja-katedral-makassar-2021>.

mampu menyediakan narasi teologis yang relevan di tengah derasny arus intoleransi.⁴ Mereka harus membentuk jemaat yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga tangguh menghadapi tekanan eksternal, sekaligus mampu membangun jembatan relasi dengan kelompok agama lain.⁵ Paradigma teologi publik menempatkan mereka sebagai agen perubahan sosial, bukan sekadar penggembala spiritual, apalagi hanya pengisi mimbar di hari Minggu.

Literatur mengenai radikalisme di Indonesia dominan menyoroti gerakan radikal Islam atau kebijakan negara, sementara kajian yang secara langsung mengeksplorasi respons pastoral gereja masih relatif jarang. Padahal, komunitas gereja berada di garis depan penerima dampak, dan pendekatan pastoral yang kontekstual sangat potensial membentuk sikap kritis dan pengetahuan jemaat untuk merespons radikalisme. Kesenjangan literatur inilah yang menjadi ruang penting untuk penelitian ini, guna menghidupkan wacana teologi pastoral dengan memahami bentuk-bentuk kepemimpinan gereja yang efektif menghadapi intoleransi.

Akar radikalisme tidak hanya berbasis keyakinan semata, tetapi terikat pada ketidakadilan sosial, marginalisasi ekonomi, serta disinformasi di media sosial.⁶ Pemimpin gereja yang memahami faktor struktural ini dapat merancang strategi pastoral yang lebih menyeluruh: misalnya pelayanan sosial, literasi digital, dan kegiatan dialog lintas iman. Dengan demikian, respons pastoral tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejadian, tetapi preventif dalam membentuk ruang publik yang inklusif dan adil. Tak kalah penting, trauma yang dialami jemaat pasca-insiden seperti Makassar tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis—percaya bahwa rumah ibadah bisa menjadi sasaran kekerasan.⁷ Meski pemerintah dan ormas telah menyalurkan bantuan maupun mengutuk aksi tersebut, perlunya pendampingan spiritual, konseling, dan *restabilisasi communal* sangat vital. Kepemimpinan gereja perlu menghadirkan program pemulihan yang

⁴ Abustan, "Pluralism and Equality in the Perspective of Human Rights in Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24205>.

⁵ Anggi Maringan Hasiholan dan Joshua Alvis Stevenson, "Teologi Agama-Agama dalam Lensa Hospitalitas Pentakostal," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 13, no. 1 (2023): 197–216, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v13i1.195>.

⁶ Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.

⁷ Gernaida Krisna Pakpahan, Ibnu Salman, dan Andreas Budi Setyobekti, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Mencegah Radikalisme," *KURIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 2 (2021).

menyentuh dimensi hati jemaat untuk membangun kembali rasa aman dan percaya terhadap kehidupan lintas agama.

Merespons keadaan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi model kepemimpinan pastoral yang berdaya tanggap—yang tidak hanya menguatkan internal jemaat, tetapi juga membina dialog dan tindakan kolaboratif dengan komunitas lintas agama dan negara. Tujuan utamanya adalah menghasilkan teori teologi pastoral kontemporer yang relevan dan mengembangkan panduan praktis untuk pemimpin gereja di Indonesia. Produk penelitian ini bukan hanya akademis, melainkan bernilai aplikatif dalam membangun ketahanan sosial dan kerukunan. Penelitian ini muncul sebagai respons akademis terhadap kondisi intoleransi, ketakutan, dan fragmentasi sosial yang terus meningkat. Dengan mengangkat pengalaman nyata komunitas Kristen Indonesia, terutama melalui refleksi pastoral atas peristiwa traumatis dan tekanan struktural, studi ini bertujuan memperkaya paradigma kepemimpinan gereja dalam konteks pluralitas dan radikalisme. Semoga dapat memberikan sumbangan konkret bagi pengembangan teologi pastoral dan strategi kepemimpinan gereja yang adaptif, progresif, dan transformatif dalam menjaga harmoni lintas agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konstruktif, yakni berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretasi makna yang dihasilkan oleh pemimpin gereja dalam merespons intoleransi keagamaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin gereja di daerah-daerah yang memiliki potensi konflik keagamaan tinggi, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*) dengan anggota jemaat dan pemuka agama lainnya, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan program pastoral gereja dalam menghadapi radikalisme. Teknik analisis data menggunakan strategi analisis tematik yang bersifat iteratif, di mana temuan awal dikonstruksi ulang melalui refleksi kritis dengan teori teologi pastoral kontekstual, teori kepemimpinan transformatif, dan kerangka teologi publik. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode, sumber, dan teori, serta dilakukan *member checking* dengan para pemimpin gereja agar hasil penelitian ini relevan dan dapat diimplementasikan secara praktis dalam konteks pastoral gereja di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respons Pastoral Pemimpin Gereja dan Tantangan dalam Menghadapi Intoleransi Keagamaan

Respons pastoral yang dihasilkan oleh pemimpin gereja dalam menghadapi intoleransi di Indonesia mencerminkan paradigma teologi publik sebagaimana dikemukakan Max Stackhouse, yang menekankan bahwa gereja harus tampil sebagai agen sosial yang aktif—bukan hanya berperan di dalam liturgi, tetapi juga di ruang publik untuk membentuk “social ethic for the 21st century”.⁸ Pemimpin gereja menginisiasi praktik dialog antar-agama melalui kunjungan bersama, kolaborasi sosial, dan forum terbuka, yang melihat keberagaman sebagai kekayaan untuk masyarakat dan bukan ancaman.

Namun, upaya dialog semacam itu menemui kendala nyata, termasuk keterbatasan dana, SDM, dan akses untuk mengadakan program lintas iman secara intensif. Kekurangan ini sejajar dengan temuan Carolina Etnasari Anjaya dan Yonatan Alex Arifianto—yang menunjukkan bahwa gereja di komunitas agama minoritas sering kesulitan mendanai inisiatif dialog dan toleransi—sehingga mereka sangat bergantung pada jejaring informal pemuka agama dan relasi pribadi.⁹ Permasalahan internal justru semakin memperumit situasi. Sebagian jemaat mempertahankan ideologi eksklusif yang menolak perjumpaan dengan agama lain, menimbulkan dilema bagi pemimpin gereja. Osmer menyebutnya sebagai konflik antara tugas normatif dan pragmatis dalam teologi praktis—yakni saat kepemimpinan harus menegakkan nilai injili, namun juga mengambil langkah praktis ke jalan dialog, sehingga sering terjadi tarik-menarik antara doktrin dan kontekstualisasi pelayanan.

Stigma eksternal dari kelompok konservatif atau radikal semakin memperumit dinamika ini. Pemimpin gereja yang mendorong pluralisme kadang dianggap “liberal” dan kehilangan suara evangelikanya. Stackhouse mengingatkan bahwa teologi publik menjadikan gereja sebagai mediator sosial, tetapi hal ini berisiko dipolitisasi dan diserang oleh narasi “liberalisme agama”. Osmer memberikan kerangka empat tugas teologi praktis untuk membantu pemimpin gereja: menggambarkan realitas (deskriptif),

⁸ Max L. Stackhouse, *God and Globalization: Volume 4: Globalization and Grace (Theology for the 21st Century)* (Edinburgh: T&T Clark Ltd., 2009).

⁹ Carolina Etnasari Anjaya dan Yonatan Alex Arifianto, “Mengembangkan Misi Gereja dalam Bingkai Moderasi Beragama,” *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.55884/thron.v3i1.27>.

menafsirkan penyebab (interpretatif), menentukan norma (normatif), serta merancang tindakan (pragmatis).¹⁰ Dalam penelitian ini, pemimpin gereja yang berhasil adalah mereka yang mampu menggerakkan empat tugas ini secara simultan, menjaga keseimbangan antara refleksi dan aksi di lapangan.

Salah satu bentuk praktis yang ditemukan adalah pelayanan terpadu: selain dialog antar-agama, mereka juga merancang kegiatan sosial—bantuan ekonomi, literasi digital, dan pelatihan toleransi—sebagai bagian dari aksi pastoral pragmatis. Hal ini sejalan dengan pendekatan Stackhouse yang menekankan teologi publik tidak hanya bersifat teoretis, tetapi harus berakar pada reformasi sosial dan ekonomi. Saya memandang pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif—melibatkan masyarakat sipil dan lembaga negara—untuk menangani akar struktur intoleransi seperti kemiskinan dan politisasi agama. Kolaborasi ini bukan hanya memperluas jangkauan pastoral, tapi memberi dimensi preventif terhadap konflik, sesuai kerangka normatif-pragmatis Osmer: "What ought to be going on?" dan "How might we respond?"¹¹

Respons pastoral yang efektif adalah respons yang visioner dan holistik—menggabungkan dialog, advis teologis, aksi sosial, dan inovasi digital. Model ini tidak hanya memperkuat internal jemaat, tetapi juga mewujudkan gereja sebagai pionir budaya damai di Indonesia. Pendekatan ini memperkaya teologi praktis, menawarkan contoh konkret bagaimana kepemimpinan gereja dapat menjadi transformator sosial yang relevan dengan kompleksitas intoleransi agama di era kontemporer.

Integrasi Teologi Publik dan Kepemimpinan Transformatif dalam Menghadapi Radikalisme

Teologi Publik adalah cabang teologi praktis yang mengkaji bagaimana iman, nilai-nilai, dan keyakinan agama dapat berkontribusi secara konstruktif dalam ruang publik, termasuk dalam kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.¹² Teologi publik menekankan bahwa agama bukan hanya urusan privat atau komunitas internal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mempengaruhi kehidupan bersama. Menurut

¹⁰ Richard R. Osmer, *Practical Theology: An Introduction* (Grand Rapids: Eerdmans, 2008).

¹¹ Osmer, 45.

¹² Fransiskus Irwan Widjaja, Harls Evan R. Siahaan, dan Nathanael Octavianus, "Partisipasi Sosial-Politik sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 378–96, <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.633>.

Stackhouse, teologi publik adalah “usaha untuk mengartikulasikan nilai-nilai iman yang dapat diterima secara rasional di tengah masyarakat pluralistik, serta memberikan kontribusi konstruktif bagi transformasi sosial.”¹³ Dengan kata lain, teologi publik berfungsi sebagai jembatan antara doktrin keagamaan dan praktik sosial, serta membantu komunitas agama mengambil peran aktif dalam menghadapi isu-isu publik seperti keadilan, hak asasi manusia, perdamaian, dan solidaritas. Dalam konteks Indonesia, teologi publik sangat relevan karena bangsa ini memiliki keragaman agama dan budaya yang tinggi, sehingga teologi publik mendorong pemimpin agama untuk berperan aktif dalam mempromosikan toleransi, kerukunan, dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang multikultural.¹⁴

Kajian mengenai integrasi teologi publik dan kepemimpinan transformatif dalam menghadapi radikalisme di Indonesia menemukan pijakan penting dalam konteks pluralisme agama dan dinamika radikalisme yang mengancam kehidupan sosial-keagamaan bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumarto dan Harahap, radikalisme agama di Indonesia sering kali muncul dalam bentuk penafsiran fundamentalis yang menolak keberagaman, menjustifikasi kekerasan, dan menuntut perubahan tatanan sosial secara ekstrem.¹⁵ Hal ini menjadi tantangan bagi pemimpin gereja untuk mengembangkan strategi pastoral yang bukan hanya reaktif tetapi juga proaktif melalui pendekatan teologi publik yang membuka ruang dialog dengan masyarakat luas.

Teologi publik, dalam konteks Indonesia yang multikultural, memberikan kontribusi penting dalam membangun relasi lintas agama dan memfasilitasi diskursus publik yang inklusif. Menurut James Eickelman, teologi publik menempatkan agama tidak hanya sebagai urusan privat tetapi juga sebagai kekuatan transformatif dalam ranah sosial-politik.¹⁶ Ini berarti pemimpin gereja harus mampu menghadirkan nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi, dan toleransi dalam kebijakan publik yang melibatkan

¹³ Stackhouse, *God and Globalization: Volume 4: Globalization and Grace (Theology for the 21st Century)*, 5.

¹⁴ Adrianus Yosia, “Teologi Publik dan Pendidikan Agama Kristen K-12 di Indonesia: Suatu Eksplorasi Awal,” *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 1 (2023): 98–110, <https://doi.org/10.47530/edulead.v4i1.140>.

¹⁵ Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, “Pemahaman Nilai-nilai Moderasi Beragama dan Kebangsaan melalui Kegiatan Diklat Kementerian Agama RI dalam Muwujudkan ASN Moderat Studi di Balai Diklat Keagamaan BDK Palembang,” *Jurnal Literasiologi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v8i2.11041>.

¹⁶ Armando Salvatore and James Eickelman, *Public Islam and the Common Good* (Leiden and Boston: Brill, 2004).

semua pihak, termasuk yang berbeda keyakinan. Integrasi ini menjadi sangat relevan ketika melihat fakta bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan intoleransi dan radikalisme yang berakar pada kecurigaan antar kelompok agama.

Dalam kerangka kepemimpinan transformatif, Anggi Maringan Hasiholan dan Purim Marbun menegaskan bahwa pemimpin transformatif tidak hanya bertindak sebagai pengelola organisasi tetapi juga sebagai agen perubahan nilai dan budaya jemaat. Pemimpin transformatif harus mampu menginternalisasi nilai-nilai teologis dan sosial ke dalam tindakan nyata yang mengedepankan kesetaraan, penghargaan terhadap keragaman, dan kesediaan untuk bekerja sama lintas iman.¹⁷ Hal ini senada dengan gagasan Obet Nego dan Agustina Pasang yang menekankan pentingnya pendidikan moderasi beragama dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan mengatasi radikalisme.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin gereja yang mengintegrasikan teologi publik dan kepemimpinan transformatif dapat memainkan peran strategis dalam menekan potensi konflik antar umat beragama. Mereka mengembangkan program lintas agama melalui forum dialog, kunjungan lintas iman, serta kerja sama sosial yang mengedepankan nilai persaudaraan dan solidaritas. Namun demikian, terdapat tantangan signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, resistensi internal jemaat yang masih memegang sikap eksklusif, serta stigma negatif dari kelompok radikal yang menuduh pemimpin gereja mendukung agenda liberalisme pluralistik.

Dalam konteks inilah penting bagi pemimpin gereja untuk mengadopsi pendekatan moderasi beragama yang mengedepankan keseimbangan (*wasathiyah*), toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Adinda Naziha (2022) menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya sebatas slogan tetapi merupakan strategi efektif dalam menangani radikalisme dan ekstremisme.¹⁹ Dengan demikian, integrasi teologi

¹⁷ Anggi Maringan Hasiholan dan Purim Marbun, "Sinergitas Kepemimpinan Senior dan Muda di GKII Se-Jabodetabek dalam Menghadapi Dampak Pandemi 19 dan Disrupsi Era: Sebuah Kajian Kepemimpinan Transformatif," *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 2 (2021): 119–38, <https://doi.org/10.52104/harvester.v6i2.73>.

¹⁸ Obet Nego dan Agustina Pasang, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Teologis: Respons terhadap Konflik Politik Berbasis Agama di Indonesia," *HUPERETES: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2023): 30–43, <https://doi.org/10.46817/huperetes.v5i1.213>.

¹⁹ Adinda Naziha, "Pentingnya Moderasi Beragama dalam Orientasi Keberagamaan Umat Islam Indonesia (Gresik: Menangani Radikalisme)," 2022, <http://conference.um.ac.id/index.php/SNP/PAI/article/view/250A3%250>.

publik dan kepemimpinan transformatif menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial jemaat yang tangguh menghadapi radikalisme.

Kajian ini juga mencatat bahwa di era digital, media sosial memainkan peran ganda: sebagai ruang yang potensial untuk dialog lintas iman, namun juga sebagai kanal yang rentan digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan narasi intoleransi. Oleh karena itu, pemimpin gereja perlu memiliki kompetensi literasi digital yang memadai agar mampu mengelola komunikasi publik secara bijak, membendung ujaran kebencian, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi yang mendukung kohesi sosial.

Teologi publik harus dikontekstualisasikan dalam realitas Indonesia yang pluralistik dan seringkali sarat dengan politisasi agama. Menurut Priyantoro Widodo dan Karnawati, konflik yang terjadi tidak hanya akibat perbedaan doktrin agama tetapi juga akibat kepentingan politik yang menggunakan agama sebagai alat mobilisasi.²⁰ Oleh sebab itu, integrasi teologi publik dan kepemimpinan transformatif harus diarahkan untuk mengkritisi sekaligus mendampingi umat agar tidak terjebak dalam politik identitas yang memecah belah. Dengan demikian, integrasi antara teologi publik dan kepemimpinan transformatif tidak hanya menjadi pendekatan teologis yang relevan tetapi juga sebagai strategi sosial-politik yang mampu mengatasi radikalisme melalui transformasi nilai dan budaya dalam kehidupan beragama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi studi kepemimpinan gereja di Indonesia, serta memperkaya diskursus teologi publik sebagai instrumen untuk memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pendekatan ini bukan hanya menjadi alternatif, tetapi sebuah keharusan dalam upaya membangun kehidupan beragama yang harmonis dan damai di Indonesia.

Kontribusi Kepemimpinan Gereja terhadap Pembangunan Budaya Damai dan Literasi Keagamaan

Kajian ini menegaskan bahwa kepemimpinan gereja di Indonesia memainkan peran yang sangat signifikan dalam membangun budaya damai di tengah keragaman agama dan budaya yang kompleks. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, gereja bukan hanya dipahami sebagai lembaga spiritual, tetapi juga sebagai

²⁰ Karnawati & Priyantoro Widodo, "Landasan Filsafat Antropologi-Teologis dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kristen," *EL-Ghiroh* 3 (2019): 81–102, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.106>.

ruang strategis untuk transformasi sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Djoys A. Rantung, pemimpin gereja memiliki mandat untuk menjadi katalisator dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerja sama lintas iman, dan solidaritas sosial sebagai respon terhadap tantangan radikalisme yang semakin nyata di berbagai daerah.²¹

Pemimpin gereja yang adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital menunjukkan kemampuan yang lebih progresif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi publik. Mereka tidak hanya mengandalkan metode konvensional dalam menyampaikan pesan pastoral, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada jemaat dan masyarakat luas. Melalui konten-konten yang relevan, mereka menghadirkan diskursus toleransi, nilai-nilai keadilan, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah keragaman yang ada. Penelitian Adon Nasrullah menunjukkan, media sosial memiliki peran ganda: di satu sisi mampu memperkuat dialog lintas iman dan memperluas akses terhadap literasi keagamaan, namun di sisi lain juga rentan digunakan sebagai kanal ujaran kebencian dan provokasi radikalisme.²² Oleh karena itu, literasi digital menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh pemimpin gereja agar mampu mengelola narasi keagamaan di media sosial dan menghadirkan pesan damai yang menyejukkan bagi masyarakat luas.

Literasi keagamaan yang inklusif sangat relevan untuk memperkuat kohesi sosial di masyarakat multikultural. Toleransi bukan sekadar sikap pasif, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan konkret yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks ini, program-program gereja seperti workshop lintas iman, seminar kebangsaan, dan bakti sosial bersama terbukti menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif jemaat tentang pentingnya hidup damai dalam kemajemukan. Ini juga memperkaya pengalaman iman jemaat sehingga mereka tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga memiliki wawasan yang luas terhadap realitas sosial.

Penelitian ini menyoroti bahwa kepemimpinan gereja yang adaptif tidak hanya fokus pada pembinaan spiritual, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila

²¹ Djoys Anneke Rantung, "Teologi Politik untuk Keadilan: Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018): 1–11.

²² Adon Nasrullah, *Agama dan Konflik Sosial Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme Dan Konflik Antarumat Beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

sebagai fondasi kebersamaan bangsa. Moderasi Beragama dalam Bingkai Teologis menegaskan bahwa moderasi bukan hanya slogan, tetapi strategi untuk membangun kesadaran akan pentingnya saling menghormati di tengah perbedaan keyakinan. Pemimpin gereja yang berhasil mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual mampu memperkuat peran gereja sebagai perekat sosial, bukan hanya bagi jemaat tetapi juga bagi masyarakat lintas agama.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan yang signifikan bagi pemimpin gereja dalam menjalankan misi pastoral ini. Tantangan terbesar datang dari internal jemaat yang masih memegang sikap eksklusif terhadap kelompok agama lain. Hal ini diperparah oleh tekanan sosial dan politik dari kelompok intoleran yang seringkali mem-framing gereja sebagai pihak yang mendukung liberalisme pluralistik. Sumarto dan Harahap mengingatkan bahwa tantangan intoleransi agama di Indonesia seringkali berakar pada struktur sosial dan politik yang kompleks, sehingga tidak cukup diatasi hanya dengan pendekatan teologis normatif.²³

Dalam konteks tantangan tersebut, kepemimpinan gereja yang transformatif dituntut untuk mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme teologis dan realitas sosial. Kepemimpinan kolaboratif yang tidak hanya bekerja di dalam gereja, tetapi juga membangun jejaring dengan pemuka agama lain, organisasi masyarakat sipil, dan pihak pemerintah untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.²⁴ Dengan cara ini, pemimpin gereja dapat menjadi motor penggerak yang memperkuat rasa saling percaya, mempromosikan nilai toleransi, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat multikultural.

Kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya gereja untuk menerapkan pendekatan teologi publik dalam setiap inisiatif sosialnya. Stackhouse menegaskan bahwa teologi publik tidak hanya berperan dalam merumuskan nilai-nilai iman secara pribadi, tetapi juga harus mampu menghadirkan kontribusi agama dalam kebijakan sosial dan pembangunan masyarakat.²⁵ Dengan demikian, pemimpin gereja yang adaptif dan transformatif akan mampu membawa nilai-nilai iman ke ruang publik secara

²³ Sumarto dan Harahap, "Pemahaman Nilai – Nilai Moderasi Beragama"

²⁴ Gernaida Krisna R. Pakpahan and Frans Pantan, "Destructive Leadership in State and Religion: An Exegetical Study of Hosea 7:1-16," *Old Testament Essays* 35, no. 2 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2022/v35n2a11>.

²⁵ Stackhouse, *God and Globalization: Volume 4: Globalization and Grace (Theology for the 21st Century)*.

rasional dan inklusif sehingga mampu menanggulangi radikalisme agama yang seringkali membonceng isu sosial-politik.

Saya memandang kontribusi kepemimpinan gereja terhadap pembangunan budaya damai dan literasi keagamaan bukan sekadar menjadi alternatif pastoral, tetapi telah menjadi keharusan teologis dan praktis di tengah realitas Indonesia yang majemuk, dinamis, dan penuh tantangan. Pemimpin gereja tidak lagi dapat memosisikan diri semata-mata sebagai penjaga iman internal jemaat, melainkan harus mampu hadir secara aktif dalam ruang publik untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan keadilan sosial. Model kepemimpinan gereja yang adaptif, kreatif, dan transformatif menjadi tuntutan mutlak agar gereja mampu merespons dinamika radikalisme agama dan intoleransi yang sering kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memecah belah persatuan bangsa.

Pemimpin gereja diharapkan memiliki sensitivitas terhadap perkembangan teknologi digital dan mampu memanfaatkannya sebagai sarana edukasi publik untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dan literasi keagamaan secara lebih efektif dan kontekstual. Melalui penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, pemimpin gereja dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, membangun narasi positif yang mempersatukan, serta menekan potensi ujaran kebencian yang menjadi benih konflik horizontal. Dengan demikian, gereja bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat edukasi sosial yang relevan bagi konteks zaman. Dengan integrasi antara teologi publik dan kepemimpinan transformatif, penelitian ini menawarkan kerangka strategis bagi pemimpin gereja untuk menjadi agen perubahan yang konkret dan berdampak. Peran ini bukan hanya memperkuat ketahanan sosial jemaat, tetapi juga membangun modal sosial yang memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, kerukunan lintas agama, dan rasa saling percaya di tengah masyarakat yang pluralistik. Dengan demikian, kepemimpinan gereja di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor budaya damai dan agen transformasi sosial yang berdaya tahan dalam menghadapi tantangan radikalisme di era digital ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan gereja memiliki peran sentral dalam menanggapi dinamika intoleransi keagamaan di Indonesia yang semakin kompleks. Pemimpin gereja tidak hanya dituntut untuk memelihara kehidupan spiritual internal jemaat, tetapi juga diharapkan menjadi agen transformasi sosial yang mampu menghadirkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kerukunan lintas iman. Model kepemimpinan yang mengintegrasikan teologi publik dan kepemimpinan transformatif terbukti efektif dalam membangun ketahanan sosial jemaat dan mempromosikan budaya damai di tengah masyarakat yang pluralistik.

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tantangan utama kepemimpinan gereja terletak pada resistensi internal jemaat terhadap nilai pluralisme dan tekanan eksternal dari kelompok intoleran yang sering mempolitikasi peran gereja di ruang publik. Dalam konteks ini, kepemimpinan gereja dituntut untuk memiliki literasi digital, strategi komunikasi efektif, dan kemampuan membangun kerja sama lintas agama dan pemerintah. Pendekatan kolaboratif terbukti strategis dalam memecah potensi konflik horizontal dan mendorong solidaritas lintas iman. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemimpin gereja di Indonesia secara aktif mengembangkan program-program pastoral yang menggabungkan pembinaan spiritual, edukasi toleransi, literasi keagamaan, serta inovasi sosial berbasis teologi publik. Dengan demikian, gereja bukan hanya menjadi benteng iman, tetapi juga pusat transformasi sosial yang relevan bagi konteks Indonesia yang majemuk dan penuh dinamika radikalisme. Model kepemimpinan gereja yang adaptif, kontekstual, dan transformatif inilah yang menjadi kunci dalam merespons intoleransi secara efektif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. "Pluralism and Equality in the Perspective of Human Rights in Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24205>.
- Adon Nasrullah. *Agama dan Konflik Sosial Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Anjaya, Carolina Etnasari, dan Yonatan Alex Arifianto. "Mengembangkan Misi Gereja dalam Bingkai Moderasi Beragama." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.55884/thron.v3i1.27>.

- Badan Pendidikan Kristen Penabur. "Peristiwa Bom di Gereja Katedral Makassar 2021." Badan Pendidikan Kristen Penabur, 2024. <https://bpkpenabur.or.id/bekasi/smak-penabur-harapan-indah/berita/berita-lainnya/peristiwa-bom-di-gereja-katedral-makassar-2021>.
- Budijanto, Oki Wahyu, dan Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.
- CNN Indonesia. "Setara Institute Catat 329 Pelanggaran KBB Sepanjang 2023." CNN Indonesia, 2024. https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/?utm_source.
- Hasiholan, Anggi Maringan, dan Purim Marbun. "Sinergitas Kepemimpinan Senior dan Muda di GKII Se-Jabodetabek Dalam Menghadapi Dampak Pandemi 19 dan Disrupsi Era: Sebuah Kajian Kepemimpinan Transformatif." *HARVESTER: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 2 (2021): 119–38. <https://doi.org/10.52104/harvester.v6i2.73>.
- Hasiholan, Anggi Maringan, dan Joshua Alvis Stevenson. "Teologi Agama-Agama dalam Lensa Hospitalitas Pentakostal." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 13, no. 1 (2023): 197–216. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v13i1.195>.
- Karnawati & Priyantoro Widodo. "Landasan Filsafat Antropologi-Teologis dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kristen." *EL-Ghiroh* 3 (2019): 81–102. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.106>.
- Krisna Pakpahan, Gernaida, Ibnu Salman, dan Andreas Budi Setyobekti. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Mencegah Radikalisme." *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 2 (2021).
- Naziha, Adinda. "Pentingnya Moderasi Beragama dalam Orientasi Keberagamaan Umat Islam Indonesia (Gresik: Menangani Radikalisme," 2022. <http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/250A3%250>.
- Nego, Obet, and Agustina Pasang. "Moderasi Beragama dalam Bingkai Teologis: Respons terhadap Konflik Politik Berbasis Agama di Indonesia." *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2023): 30–43. <https://doi.org/10.46817/huperetes.v5i1.213>.
- Osmer, Richard R. *Practical Theology: An Introduction*. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
- Pakpahan, Gernaida Krisna R., and Frans Pantan. "Destructive Leadership in State and Religion: An Exegetical Study of Hosea 7:1-16." *Old Testament Essays* 35, no. 2 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2022/v35n2a11>.
- Rantung, Djoys Anneke. "Teologi Politik untuk Keadilan: Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 2, no. 1 (2018): 1–11.
- Salvatore, Armando, and James Eickelman. *Public Islam and the Common Good*. Leiden and Boston: Brill, 2004.

- Stackhouse, Max L. *God and Globalization: Volume 4: Globalization and Grace (Theology for the 21st Century)*. Edinburgh: T&T Clark Ltd., 2009.
- Sumarto, and Emmi Kholilah Harahap. "Pemahaman Nilai – Nilai Moderasi Beragama dan Kebangsaan melalui Kegiatan Diklat Kementerian Agama RI dalam Muwujudkan ASN Moderat Studi di Balai Diklat Keagamaan BDK Palembang." *Jurnal Literasiologi* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v8i2.11041>.
- Widjaja, Fransiskus Irwan, Harls Evan R. Siahaan, dan Nathanael Octavianus. "Partisipasi Sosial-Politik sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 378–96. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.633>.
- Yosia, Adrianus. "Teologi Publik dan Pendidikan Agama Kristen K-12 di Indonesia: Suatu Eksplorasi Awal." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 1 (2023): 98–110. <https://doi.org/10.47530/edulead.v4i1.140>.